

**ANALISIS KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN  
KOTA BENGKULU  
DALAM UPAYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS  
PELAYANAN DI PUSKESMAS**

Oleh :  
**YANDRIZAL \*)**

**DISAJIKAN PADA SEMINAR NASIONAL  
FORUM KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA IV  
DI KUPANG NTT PADA TANGGAL 4 S.D 7 SEPTEMBER 2013**

**\*) FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



# LATAR BELAKANG

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Biaya Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) Kota Bengkulu yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu.

## Jumlah Anggaran pada :

1. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan jumlah rujukan 10.417 orang rata2 Rp.115.196,- per orang
2. Tahun 2011 anggaran Rp.999.960.000,- jumlah rujukan 8.333 orang rata2 Rp. 120.000,- per orang
3. Tahun 2012 jumlah Rp. 1450.000.000 dan tagihan mencapai Rp. 3.635.964.128,- rujukan 2226 orang/rata2 Rp. 1.641.493 per orang.

## Kunjungan di puskesmas Program Jamkesmas Kota Bengkulu

1. Tahun 2009 berjumlah 59.434 orang dan yang dirujuk 5484 orang (9,2%),
2. Tahun 2010 berjumlah 62.002 orang dan dirujuk 6210 orang (10,0%),
3. Tahun 2011 berjumlah 61.953 orang dan dirujuk 5656 orang (9,1%).

➔ Jumlah rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit Umum M. Yunus relatif masih tinggi.

**Pemerintah Kota Bengkulu memberlakukan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas.**



**berdampak rendahnya motivasi pukesmas dalam memberikan pelayanan.**



**Besarnya biaya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Provinsi**



**Dapat diefisiensikan dengan mengoptimalkan peran puskesmas sebagai pelayanan dasar perorangan. dan upaya kesehatan masyarakat/ promotif dan preventif.**

# METODE

Unit analisis pada Penelitian ini adalah :

- 1) Puskesmas 20 Unit;
- 2) Penyelenggaraan Jamkes PT. Askes 1(satu) orang dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Kota 1(satu) orang,
- 3) Pemerintah Kota : Kelapa dan satu staf Bagian Kesra, Kepala dan kepala bidang yankes Kota Dinkes Kota Bengkulu.

## Instrument Penelitian

Kuesioner dan pedoman Wawancara,  
Materi Kuesioner berisi :

- 1. Puskesmas,** Pemahaman petugas terhadap Peraturan Walikota tentang jamkeskot
- 2. Dinas Kesehatan Kota,** Pemahaman petugas terhadap Peraturan Walikota tentang jamkeskot, pengendalian biaya dan efisiensi..



## Instrument Penelitian

- 3. Bagian Kesra Pemda Kota Bengkulu,** Pemahaman petugas terhadap Peraturan Walikota tentang Jamkeskot, penyelenggaraan jaminan kesehatan, pengendalian biaya dan efisiensi penyelenggaraan jaminan kesehatan,
- 4. Penyelenggaraan Jamkeskot (PT. Askes dan Bag. Kesra),** Pemahaman petugas terhadap Peraturan Walikota tentang jamkeskot, pengetahuan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan, pengendalian biaya dan efisiensi.

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksana Jamkeskot adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah kendali Walikota. Pelaksana Jaminan Kesehatan Kota adalah Bag Kesra, Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas yang merupakan bagian dari sistem Pemerintahan Kota Bengkulu, sehingga kebijakan sangat mungkin dapat diterapkan sesuai dengan tujuan.

## PUSKESMAS

- 1) Pemerintah Kota masih menerapkan pengobatan gratis di puskesmas, → meningkatnya jumlah kunjungan;
- 2) Sebagian masyarakat tidak ingin minta langsung dirujuk ke rumah sakit karena gratis, pelayanan kurang bermutu hal sedana kata Johnson, bahwa Pasien masih kurang puas dengan pelayanan di puskesmas.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian 12 informan mengatakan jumlah kunjungan meningkat, menyebabkan motivasi petugas menurun karena tidak ada insentif dari Pemerintah Kota,

### Pemda Kota

Peran Dinas Kesehatan Kota yang mempunyai 20 puskesmas sebagai UPT, sangat menentukan keberhasilan penerapan kebijakan jamkeskot, Dinas Kesehatan Kota belum memberikan bimbingan teknis secara teratur

- Kondisi ini berdampak kepada kebijakan Jamkeskot yang diterapkan oleh puskesmas dengan apa adanya,
- DinKes harus : meningkatkan kualitas tenaga, menyediakan sarana dan prasarana penunjang medis.

Bapel :

PT. Askes dan Bagian Kesra Penda Kota hanya melakukan pembayaran klaim setelah verifikasi.

→ Bimbingan teknis kepada puskesmas dalam upaya pengendalian biaya dan efektifitas belum dilakukan secara teratur karena bukan kewenangan dari Penyelenggara jamkeskot.

→ Kebijakan Jamkeskot dilaksanakan belum menerapkan prinsip asuransi, dimana penyelenggara berfungsi mengendalikan mutu dan biaya.

Kebijakan Jamkeskot

Pelaksanaan Jamkeskot sebaiknya menentukan Badan Penyelenggara, karena program Jaminan Kesehatan dalam Sisten Jaminan Sosial Nasional adalah bahwa Badan Penyelenggara harus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi jaminan kesehatan.

## Kesimpulan

1. Puskesmas merujuk pasien (67%) masih berwenang mengobati;
2. Puskesmas merujuk pasien ke RSUD M. Yunus karena peralatan dan obat yang terbatas;
3. Pasien yang dirujuk sebagian besar memaksa untuk dirujuk karena pelayanan gratis dipuskesmas kurang berkualitas;
4. Dinas Kesehatan Kota belum optimal melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan;
5. Bagian kesra belum optimal melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota untuk melakukan pembinaan kepada Puskesmas;
6. Penyelenggara belum melakukan pembinaan kepada Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan primer dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan;
7. Pelaksanaan Jamkeskot Belum menerapkan prinsip jaminan kesehatan sosial

# Saran

Kebijakan JamKes Kota perlu diperbaiki agar dapat mencapai tujuan :

- 1) Pemerintah Kota membentuk Tim terdiri dari Bagian Kesra, Dinas Kes. Kota dan Badan Penyelenggara untuk melakukan bimbingan teknis secara rutin,
- 2) Pemda Kota Bengkulu melengkapi peralatan medis dan obat-obatan dengan sumber dari APBD Kota Bengkulu, APBD Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 3) Puskesmas menfokuskan kegiatan promotif dan preventif penyebab penyakit yang diderita masyarakat;
- 4) Puskesmas memberi penyuluhan PHBS, KIE Gizi secara rutin setiap posyandu, setiap hari kepada pengunjung ke puskesmas saat menunggu dan kelompok tertentu



# Saran

Lanjutan

- 4) Pemda Kota mengintruksikan bagian kesra untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar melaksanakan jamkeskot secara optimal, dengan menyelesaikan masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan jamkeskot;
- 5) Penyelenggaran melakukan koordinas dengan Dinas Kesehatan Kota agar melakukan bimbingan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan jamkeskot kepada puskesmas;
- 6) Pemerintah Kota sebaiknya memperbaiki kebijakan jamkeskot dengan menyerahkan pengelolaan kepada badan penyelenggara jaminan kesehatan.



TERIMA KASIH